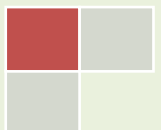




**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Kantor : Jl. Pamularsih No. 28
Semarang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kami berkewajiban untuk menyusun program yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Renstra disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Renstra ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD (indikator program) serta indikator kegiatan Tahun 2018-2023.

Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak**

**Drs. SRI WINARNA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670726 199403 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN PENENTUAN ISU-ISU STRAGEIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Strategi	63
4.2 Arah Kebijakan	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Catatan Penting	101
8.2 Kaidah Pelaksanaan	101
8.3 Rencana Tindak Lanjut	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1	Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Nasional	17
Gambar 2.2	Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015	19
Gambar 2.3	Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional Tahun 2016	20
Gambar 2.4	Grafik Persandingan capaian pengeluaran per kapita laki-laki dengan perempuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016	20
Gambar 2.5	Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Nasional.....	21
Gambar 2.6	Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Nasional	23
Gambar 2.7	Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Provinsi lainnya dan IDG Nasional Tahun 2016.....	24
Gambar 2.8	Grafik Persandingan capaian keterlibatan di parlemen laki-laki dengan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	24
Gambar 2.9	Grafik Capaian KLA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	25
Gambar 2.10	Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	26
Gambar 2.11	Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	26
Gambar 2.12	Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	27
Gambar 2.13	Grafik Total Fertility Rate (TFR) / Angka Kelahiran Total Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 -2017.....	29
Gambar 2.14	Grafik Contraceptive Prevalence Rate/CPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	30
Gambar 2.15	Grafik Drop Out KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	30
Gambar 2.16	Grafik Unmetneed KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	30
Gambar 2.17	Grafik Keaktifan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	31
Gambar 2.18	Grafik Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Bulan Juli Tahun 2018	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Bulan Juli Tahun 2018	15
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	15
Tabel 2.4	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2015	18
Tabel 2.5	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten /Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2015.....	22
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2017.....	28
Tabel 2.7	Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	32
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	33
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.....	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50
Tabel 3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2015 – 2019	56
Tabel 3.4	Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019	59
Tabel 3.5	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	60
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018–2023	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	65
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	71

Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	84
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

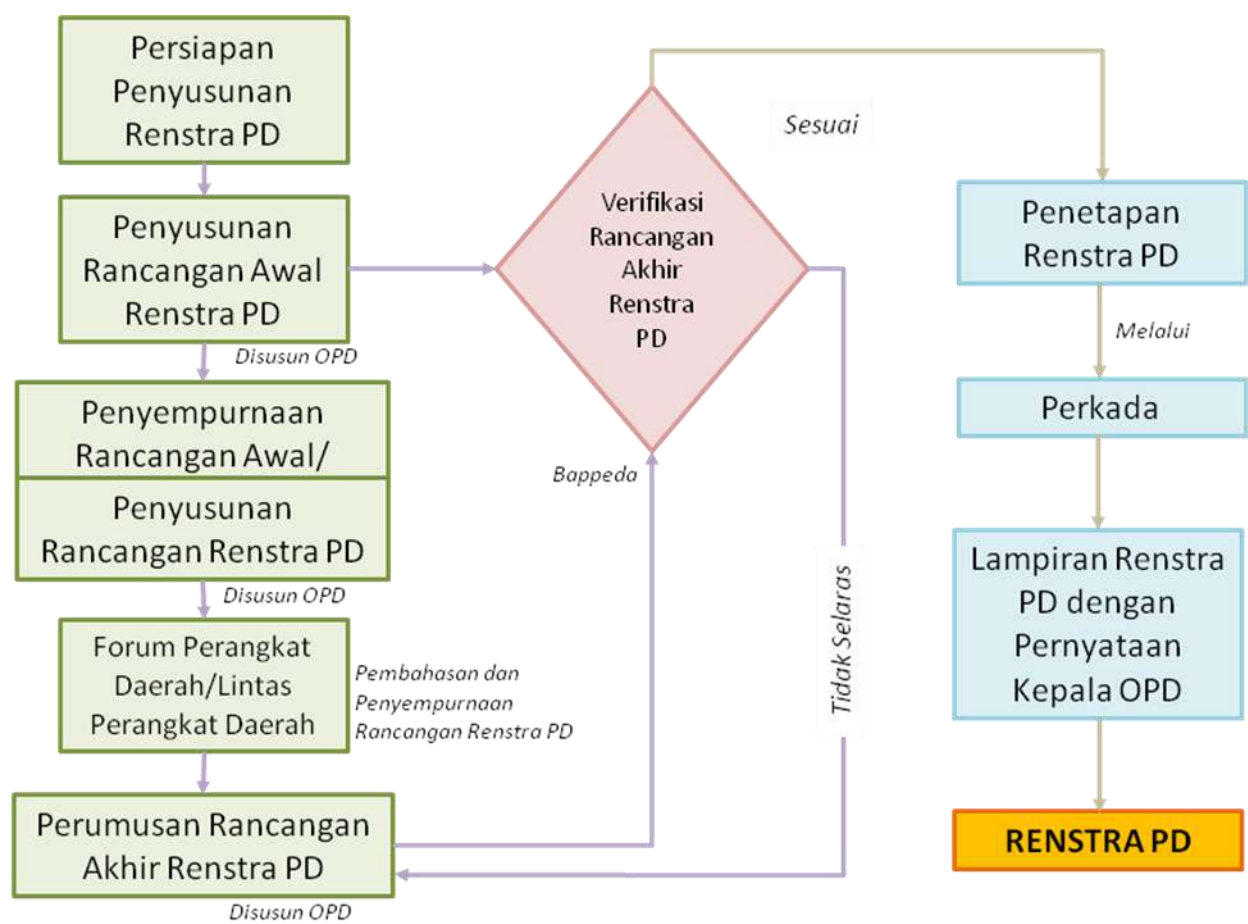
Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap

- Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Povinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
 39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
 40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);
48. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
50. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 76);
51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);

52. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama perangkat daerah dan indicator kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan, membawahkan:
 - a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan.
4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera.
6. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, membawahkan :
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi.
7. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Partisipasi Masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - a. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat
- Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 117 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 91 orang sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	-	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	1	-	1	1
3	SMA Sederajat	4	-	4	12	2	14	18
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	2	2	-	-	-	2
6	DIV	-	2	2	-	-	-	2
7	S1	11	16	27	4	4	8	35
8	S2	8	16	24	-	1	1	25
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	36	61	17	7	24	85

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 35 orang (41,18%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 25 orang (29,41%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 20 orang (21,18%). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	2	6
3	Golongan III	12	27	39
4	Golongan IV	8	7	15
Jumlah		25	36	61

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Dalduk KB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	2	-	1
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	2
II	Peralatan dan Mesin			
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Pompa Air	6	-	6
	Generating set	1	-	1
	Gear Pump 20LMenit	1	-	1
	Panel Cos Genset	1	-	1
	Tangki Genset	1	-	1
	Genset Mobil	1	-	1
2	Alat-Alat Angkut	22	-	22
	Mobil	11	-	11

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Sepeda Motor	11	-	11
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.119	-	1.119
4	Alat Studio dan Komunikasi-	50	-	50
	Screen Projector	6	-	6
	LCD Projector	5	-	5
	Pesawat Telepon	22	-	22
	Telepon Central	4	-	4
	Instalasi PABX	1	-	1
	Handycam	1	-	1
	Camera	2	-	2
	Power Mixer	2	-	2
	Facsimil	2	-	2
	CCTV	1	-	1
	Monitor/TV CCTV	1	-	1
	Audio Conference	1	-	1
	Hotline Service Telepon	1	-	1
	Mic Wireles	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung	4	-	4
	Bangunan Gedung Kantor	2	-	2
	Bangunan Monumen (Baliho)	2	-	2
IV	Aset Tetap Lainnya		-	
	Buku dan Perpustakaan	636	-	636
	Barang Bercorak Kebudayaan	4	-	4
	Jumlah Total	1.847	-	1.847

Dari tabel tersebut diatas menunjukan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan penambahan.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang optimal.

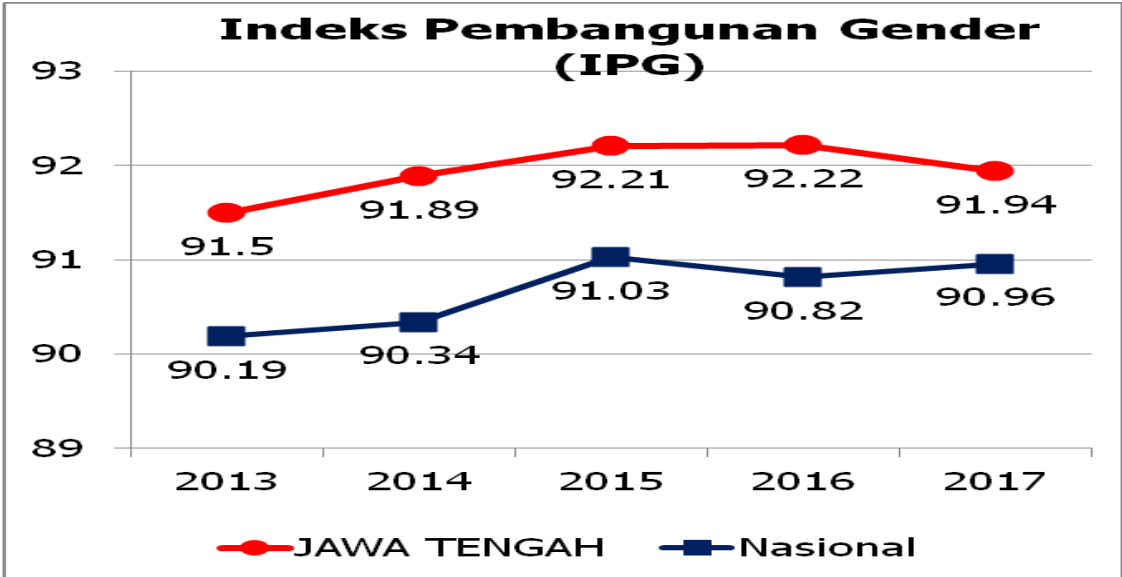
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Jawa Tengah menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



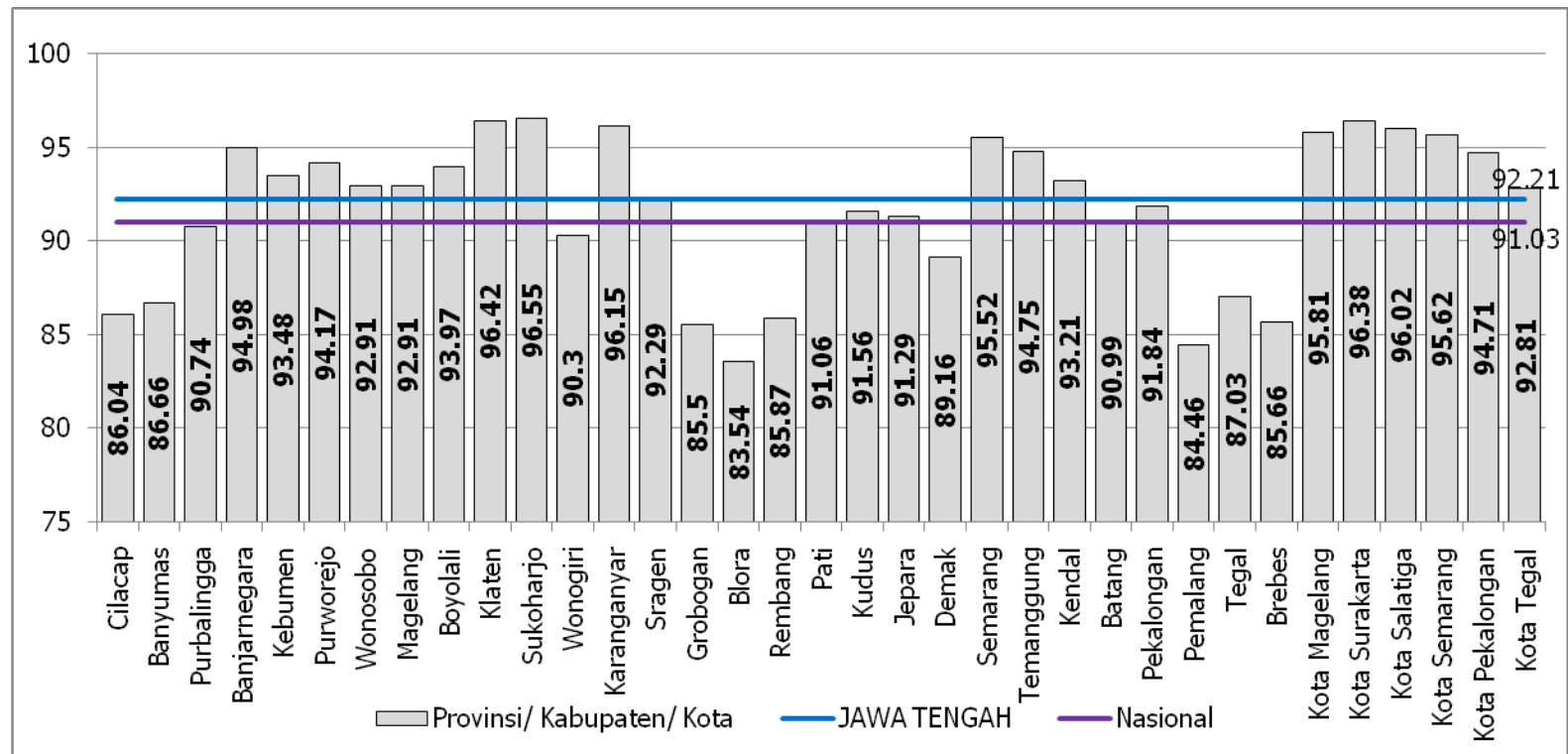
Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Dilihat capaian IPG kabupaten kota Jawa Tengah menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2015

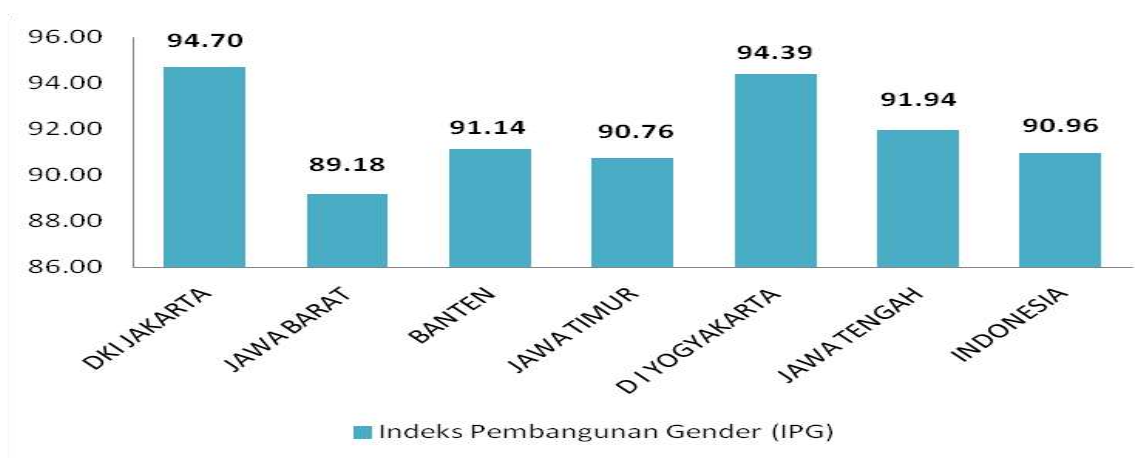
NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cilacap	85.15	85.78	85.83	86.16	86.04	-	-
2	Banyumas	86.07	86.25	86.53	86.54	86.66	-	-
3	Purbalingga	88.51	88.93	89.12	90.12	90.74	-	-
4	Banjarnegara	91.26	91.64	92.51	94.97	94.98	-	-
5	Kebumen	91.74	92.26	92.7	92.81	93.48	-	-
6	Purworejo	92.59	93.12	93.43	93.94	94.17	-	-
7	Wonosobo	90.04	91.15	91.67	92.51	92.91	-	-
8	Magelang	91.02	92.16	92.2	92.79	92.91	-	-
9	Boyolali	91.91	92.19	92.52	92.76	93.97	-	-
10	Klaten	93.12	94.69	95.16	95.9	96.42	-	-
11	Sukoharjo	95.16	95.34	95.53	96.34	96.55	-	-
12	Wonogiri	88.1	89.47	89.81	89.87	90.3	-	-
13	Karanganyar	93.83	95.42	95.71	96.08	96.15	-	-
14	Sragen	91.91	91.93	92.04	92.13	92.29	-	-
15	Grobogan	83.85	85.04	85.28	85.44	85.5	-	-
16	Blora	81.34	82.26	82.55	82.66	83.54	-	-
17	Rembang	85.12	85.57	85.72	86.04	85.87	-	-
18	Pati	89.28	89.31	89.43	89.99	91.06	-	-
19	Kudus	89.99	90.26	90.33	90.82	91.56	-	-
20	Jepara	88.78	89.64	90.19	91.21	91.29	-	-
21	Demak	88.49	88.9	88.98	89.28	89.16	-	-
22	Semarang	94.71	94.83	95.17	95.43	95.52	-	-
23	Temanggung	92.08	92.32	94.81	94.97	94.75	-	-
24	Kendal	92.71	92.87	93.14	93.22	93.21	-	-
25	Batang	88.66	88.98	89.9	90.79	90.99	-	-
26	Pekalongan	91.12	91.45	91.65	91.88	91.84	-	-
27	Pemalang	80.51	83.13	83.51	83.85	84.46	-	-
28	Tegal	84.09	84.55	85.78	86.76	87.03	-	-
29	Brebes	84.43	84.59	85.58	85.6	85.66	-	-
30	Kota Magelang	94.83	95.14	95.36	95.45	95.81	-	-
31	Kota Surakarta	95.32	95.7	96.16	96.48	96.38	-	-
32	Kota Salatiga	94.64	94.81	94.91	95.53	96.02	-	-
33	Kota Semarang	93.58	94.17	95.17	95.56	95.62	-	-
34	Kota Pekalongan	93.55	94.31	94.62	94.65	94.71	-	-
35	Kota Tegal	90.24	90.89	91.26	92.1	92.81	-	-
36	JAWA TENGAH	90.92	91.12	91.5	91.89	92.21	92.22	91.94
	Nasional	89.52	90.07	90.19	90.34	91.03	90.82	90.96



Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

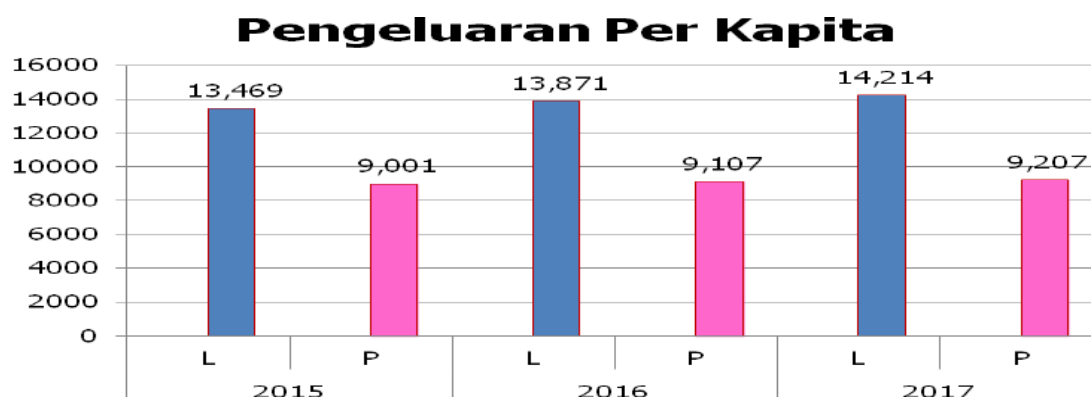
Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di sekitar Jawa Tengah menunjukkan capaian Jawa Tengah tahun 2017 lebih bagus, berada dibawah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jawa Tengah dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Apabila dilihat dari komponen pendukung IPG, diketahui bahwa masih tingginya gap antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi yang ditunjukkan pada komponen pengeluaran per kapita tahun 2017 laki-laki sebesar 14,214 sedangkan perempuan sebesar 9,207. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan masih terbatas dan perlu perhatian dari pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian pengeluaran perkapita perempuan dari tahun ke tahun pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pergerakan meningkat dikarenakan telah adanya upaya dari pemerintah beserta masyarakat dan dunia usaha dalam memperluas akses perempuan dalam berwirausaha dan bekerja. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan tahun 2015-2017 sebagai berikut :

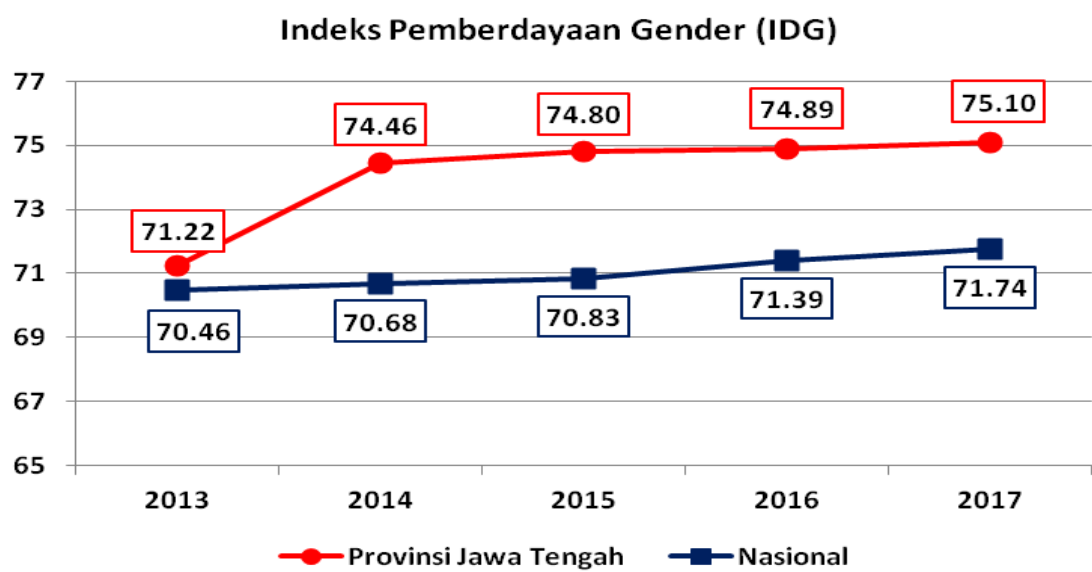


Gambar 2.4 Grafik Persandingan capaian pengeluaran per kapita laki-laki dengan perempuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Jawa Tengah tahun 2017 pada tingkat provinsi cukup baik, bahkan diatas rata-rata nasional. Apabila dilihat capaian per tahun menunjukkan tren meningkat dan selalu diatas rata-rata nasional. Hal tersebut dikarenakan upaya pemberdayaan perempuan semakin meningkat yang sinergi dengan lintas sektor dan mendapat dukungan masyarakat dan dunia usaha. Capaian IDG Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.5 Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Nasional

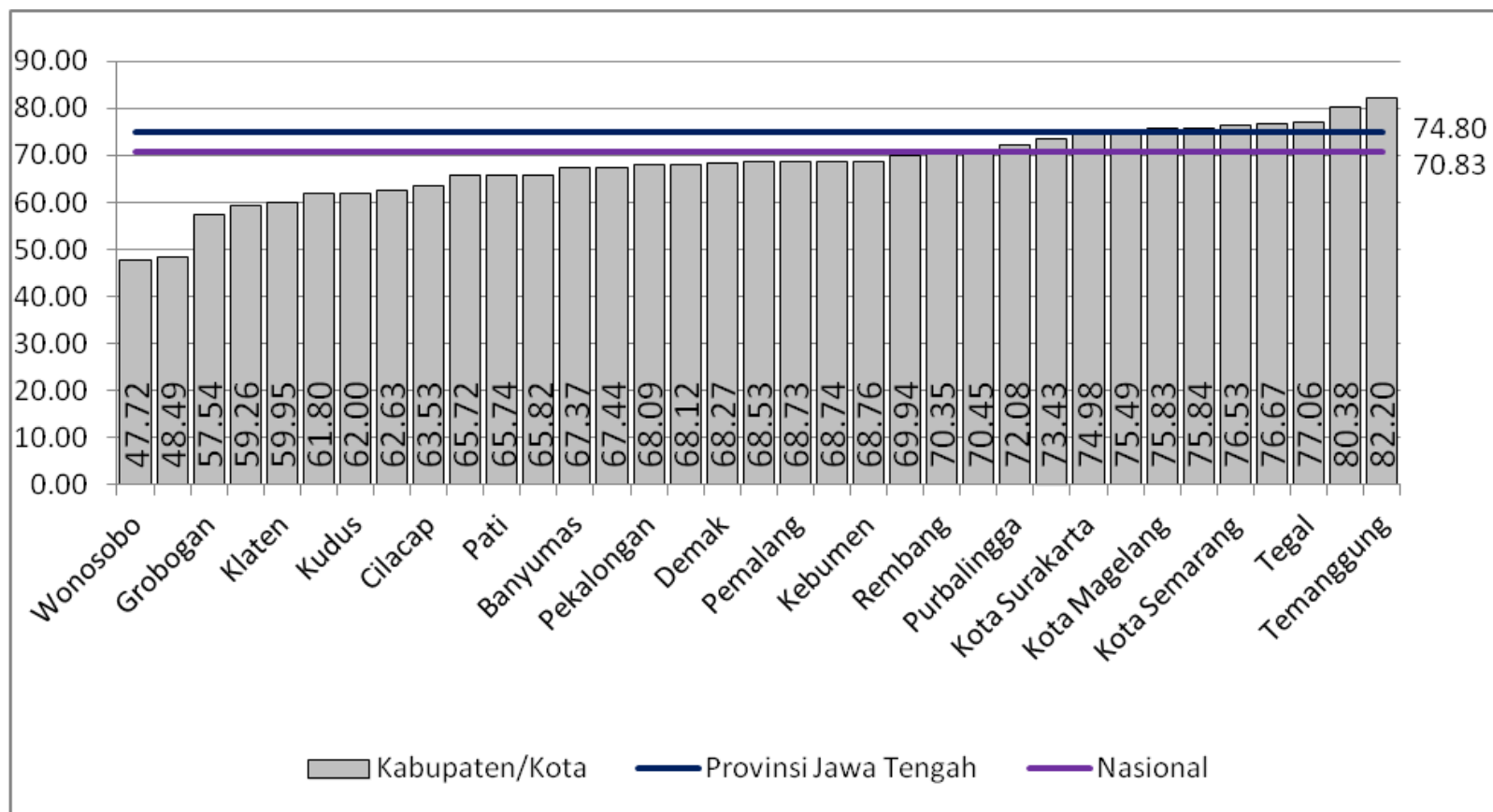
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, maka kesenjangan antar kabupaten kota dapat kita kategorikan menjadi 2 : 1) Kabupaten/Kota rata-rata di bawah Provinsi; 2) Kab/Kota rata-rata diatas Provinsi, dengan Kabupaten Wonosobo dengan pencapaian IDG 47.72 atau paling rendah di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Temanggung memiliki capaian 82.20 atau merupakan Kabupaten/Kota paling tinggi pencapaian IDG bahkan melebihi capaian Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2015

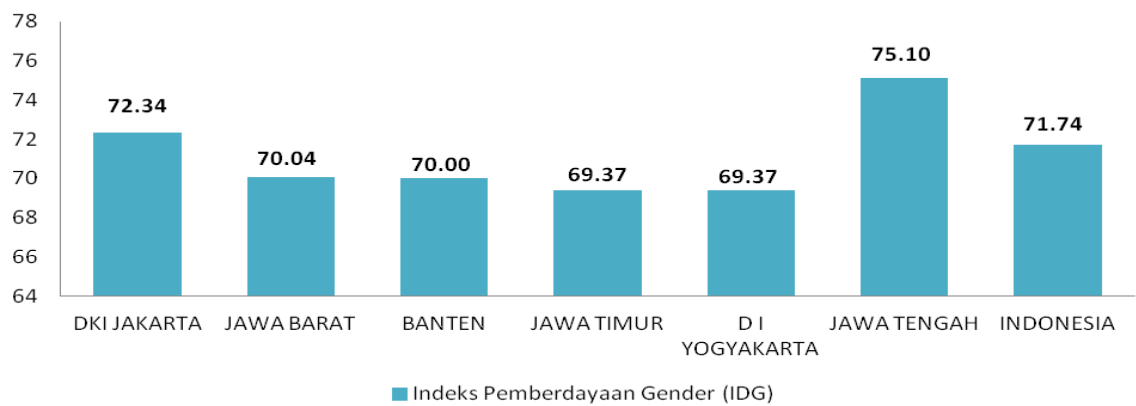
NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Wonosobo	48.06	46.35	48.96	45.36	47.72	-	-
2	Jepara	47.23	47.29	47.92	47.85	48.49	-	-
3	Grobogan	57.45	59.40	59.76	56.95	57.54	-	-
4	Brebes	53.95	53.28	51.14	61.00	59.26	-	-
5	Klaten	70.41	70.93	71.04	59.93	59.95	-	-
6	Sragen	57.18	57.58	57.92	61.75	61.80	-	-
7	Kudus	66.05	68.10	67.65	60.56	62.00	-	-
8	Wonogiri	62.71	62.80	61.10	63.34	62.63	-	-
9	Cilacap	57.72	53.40	56.58	63.23	63.53	-	-
10	Banjarnegara	59.23	61.07	61.03	67.78	65.72	-	-
11	Pati	63.63	63.00	65.99	65.95	65.74	-	-
12	Boyolali	68.82	69.39	69.56	65.71	65.82	-	-
13	Banyumas	67.64	64.78	65.50	64.41	67.37	-	-
14	Kota Pekalongan	68.44	66.22	68.67	63.88	67.44	-	-
15	Pekalongan	56.81	57.35	67.03	66.84	68.09	-	-
16	Batang	64.74	64.48	65.62	66.61	68.12	-	-
17	Demak	70.84	69.68	69.33	66.60	68.27	-	-
18	Magelang	60.79	61.27	58.77	65.54	68.53	-	-
19	Pemalang	69.95	68.20	70.21	68.41	68.73	-	-
20	Purworejo	58.30	60.76	67.59	68.76	68.74	-	-
21	Kebumen	65.63	66.31	67.32	67.98	68.76	-	-
22	Blora	75.08	74.85	75.11	67.34	69.94	-	-
23	Rembang	69.97	69.98	69.27	66.43	70.35	-	-
24	Sukoharjo	67.46	68.73	67.02	71.94	70.45	-	-
25	Purbalingga	67.47	67.26	68.66	71.03	72.08	-	-
26	Kendal	64.65	60.96	66.56	74.54	73.43	-	-
27	Kota Surakarta	78.06	79.32	78.93	74.93	74.98	-	-
28	Semarang	76.92	75.10	77.45	75.28	75.49	-	-
29	Kota Magelang	66.78	67.29	68.03	78.82	75.83	-	-
30	Karanganyar	66.44	66.89	71.66	77.00	75.84	-	-
31	Kota Semarang	64.48	66.61	70.62	75.58	76.53	-	-
32	Kota Tegal	69.18	68.00	65.15	76.73	76.67	-	-
33	Tegal	51.70	51.16	51.91	68.02	77.06	-	-
34	Kota Salatiga	81.45	81.25	80.91	80.36	80.38	-	-
35	Temanggung	72.00	71.83	72.96	81.65	82.20	-	-
36	Provinsi Jawa Tengah	68.99	70.82	71.22	74.46	74.80	74.89	75.10
	Nasional	69.14	70.07	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



Gambar 2.6 Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Nasional
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

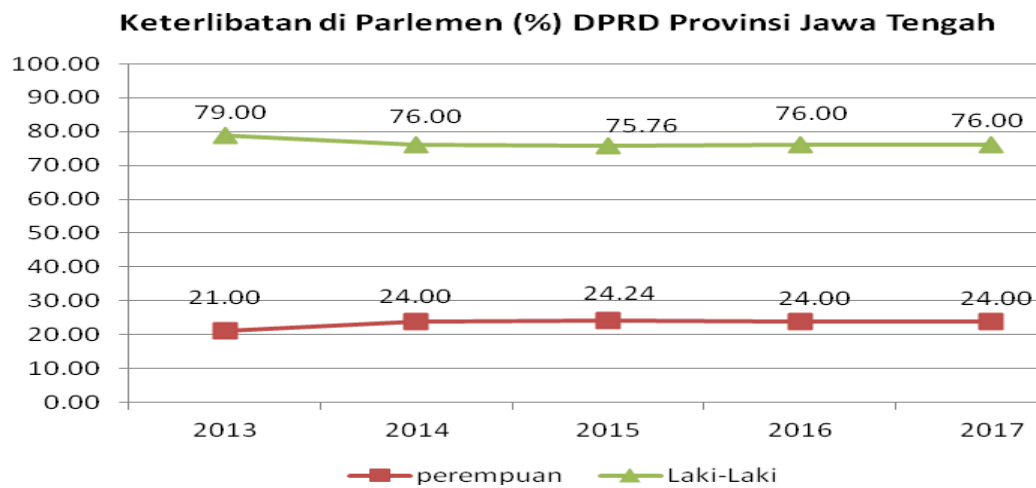
Jika diperbandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Jawa, maka nampak posisi Provinsi Jawa Tengah dengan pencapaian tertinggi bahkan lebih tinggi dari pencapaian nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.7 Grafik Persandingan capaian IDG Provinsi Jawa Tengah dengan IDG Provinsi lainnya dan IDG Nasional Tahun 2017

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Apabila dilihat dari komponen pendukung, diketahui bahwa keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Provinsi Jawa Tengah) saat ini masih rendah sebesar 24% dari 100 orang anggota dewan. Namun demikian pada pemilu 2014 yang lalu telah mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada pemilu 2009 sebesar 21%. Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Provinsi Jawa Tengah) tersebut menunjukkan adanya kesenjangan/gap antara laki-laki dan perempuan masih tinggi sehingga perlu untuk mendorong dan peningkatan pemberdayaan perempuan agar keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Provinsi Jawa Tengah) minimal sampai dengan 30%. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen (DPRD Provinsi Jawa Tengah) dan kesenjangan dengan laki-laki dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.8 Grafik Persandingan capaian keterlibatan di parlemen laki-laki dengan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

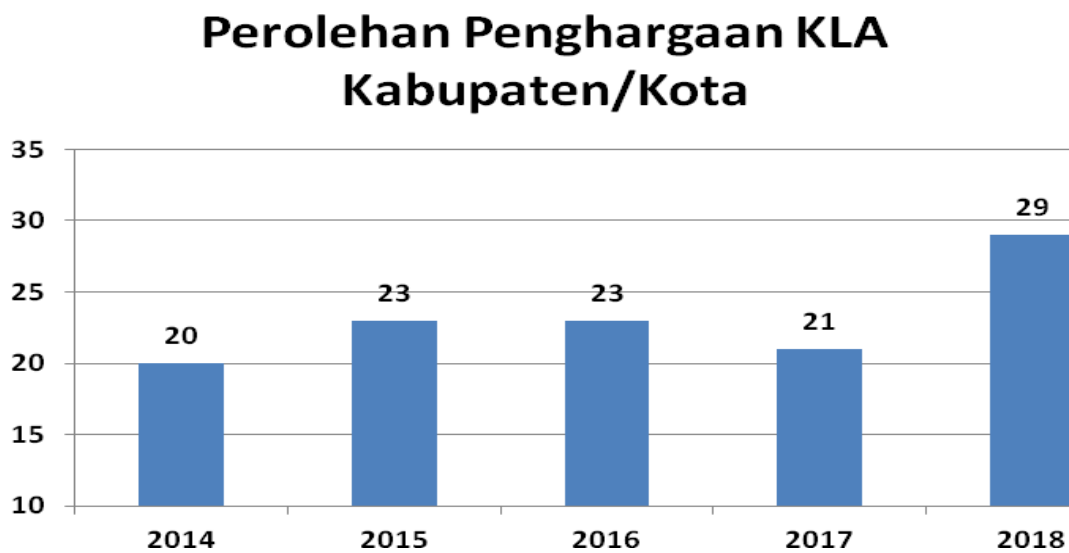
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

2. Pemenuhan Hak Anak

Secara umum capaian pemenuhan hak anak ditunjukkan dalam pemenuhan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terealisasi melalui perolehan penghargaan KLA dari tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama bagi Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2018 kabupaten/kota yang telah mendapat penghargaan KLA di Jawa Tengah sebesar 82,86% atau sebesar 29 Kab/Kota terinci sebagai berikut :

- a. Tingkat Utama (1) : Kota Surakarta;
- b. Tingkat Nindya (1) : Kota Magelang;
- c. Tingkat Madya (6) : Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Rembang, Brebes, Pekalongan, Klaten;
- d. Tingkat Pratama (21) : Kabupaten Demak, Wonosobo, Temanggung, Tegal, Blora, Kendal, Purworejo, Sragen, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Pemalang, Semarang, Cilacap, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan.

Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya atau sebesar 17,14% perlu didorong peningkatan pemenuhan indikator KLA agar pemenuhan hak anak semakin meningkat dirasakan anak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Capaian KLA tahun 2014-2018 dapat digambarkan pada grafik berikut :



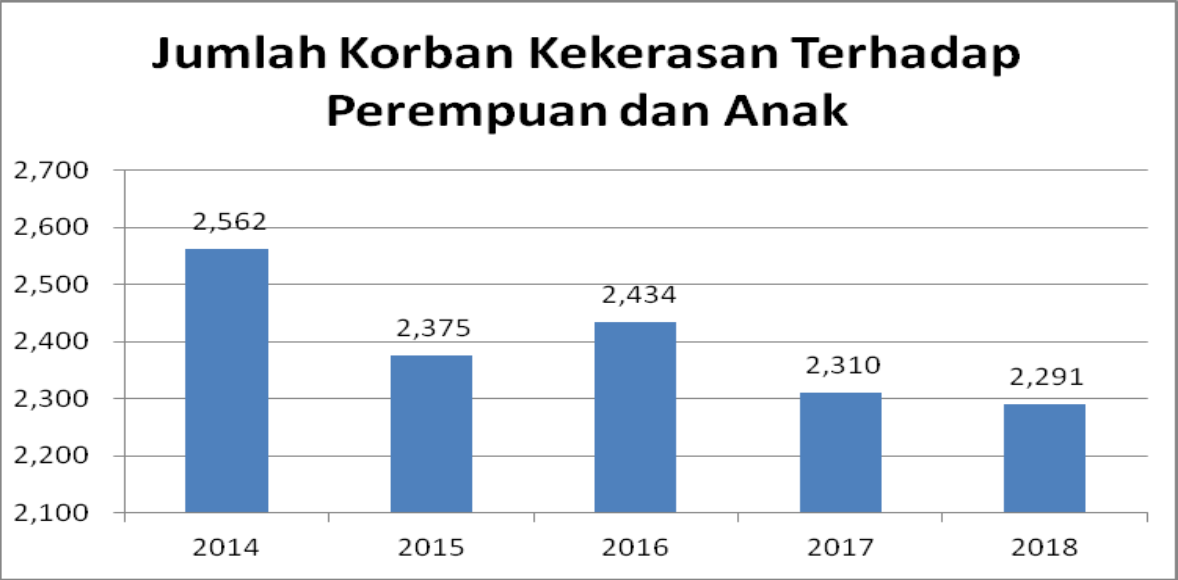
Gambar 2.9 Grafik Capaian KLA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : Kementerian PPPA, 2018.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak

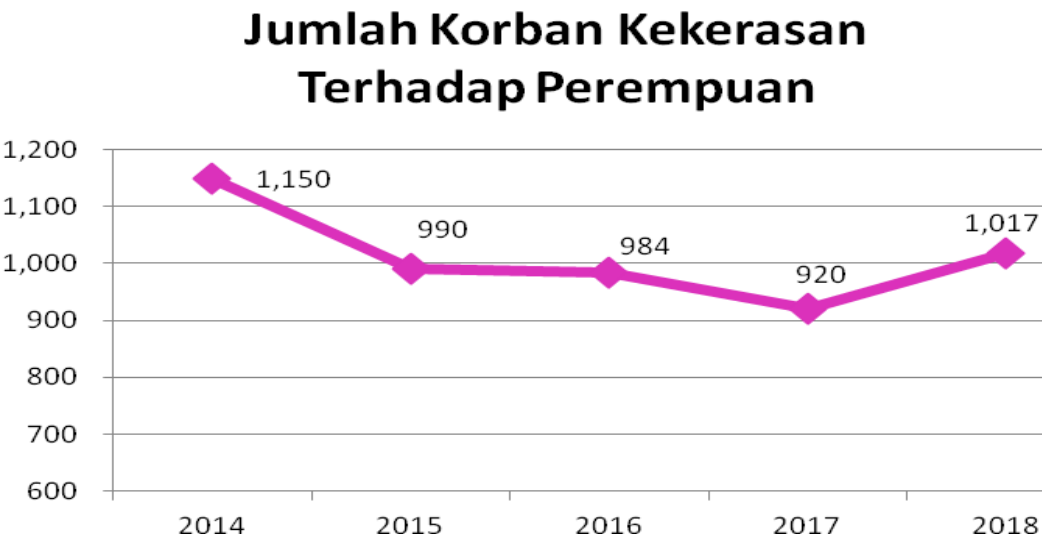
Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 2.291 korban, artinya setiap hari terdapat 6 orang perempuan dan anak mengalami kekerasan. Apabila dibanding tahun 2017 sebanyak 2.310 korban, mengalami penurunan sebanyak 19 orang (0,82%). Dilihat dari komponennya, jumlah korban kekerasan yang dialami perempuan cenderung menurun dari tahun 2014 sebanyak 1.150 korban menjadi 1017 korban di tahun 2018. Sedangkan

jumlah korban kekerasan yang dialami anak bersifat fluktuatif, namun mengalami penurunan dari tahun 2014 sebanyak 1.412 korban menjadi 1.274 korban di tahun 2018. Walaupun mengalami penurunan, jumlah tersebut sangat tinggi, sehingga perlu upaya keras untuk pencegahan dan penanganannya. Penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan dalam grafik berikut :



Gambar 2.10 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

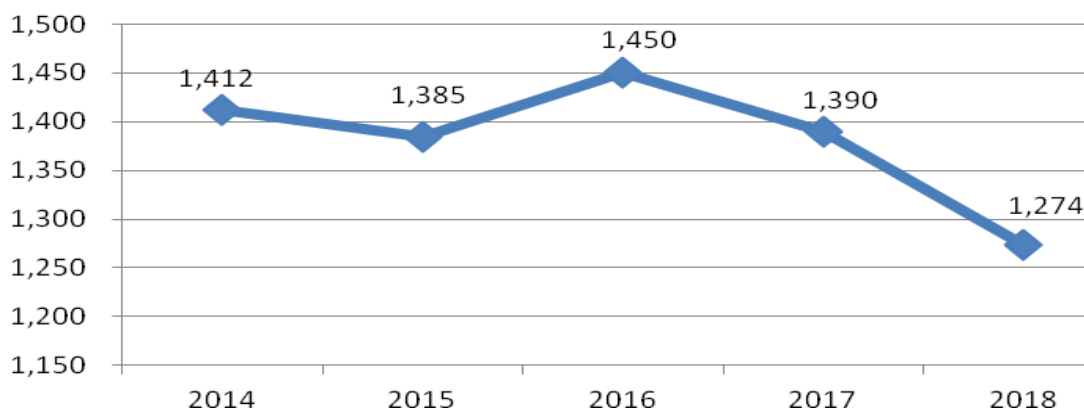
Sumber : SIMFONI PPA Kementerian PPPA, 2019.



Gambar 2.11 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : SIMFONI PPA Kementerian PPPA, 2019.

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak



Gambar 2.12 Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : SIMFONI PPA Kementerian PPPA, 2019.

4. Kesertaan Keluarga Berencana

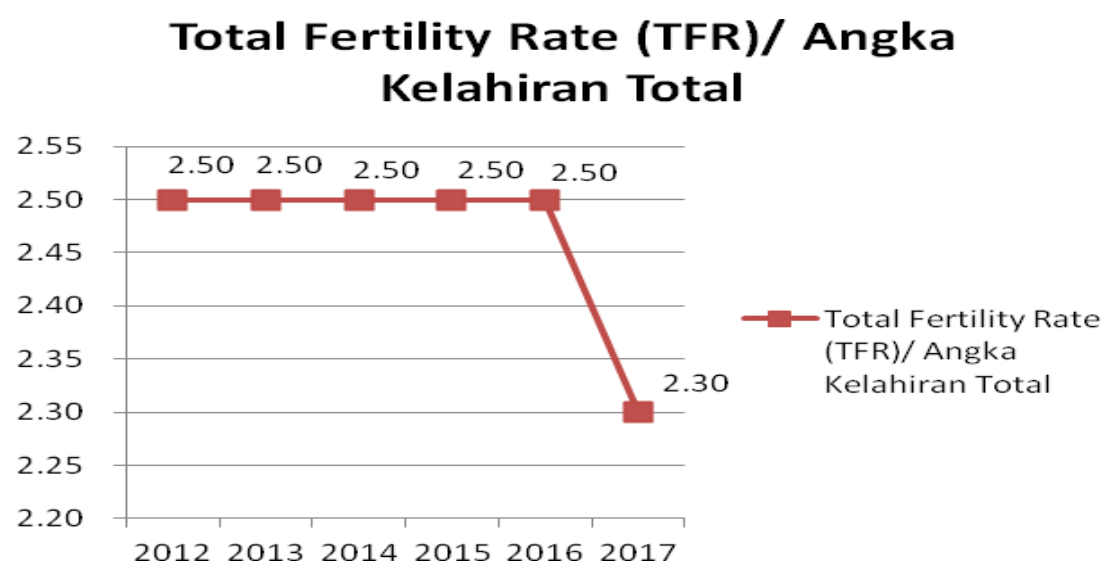
Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2017 berdasarkan proyeksi BPS sebanyak 34,257,865 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16,988,093 jiwa (49.59%) dan perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa (50.41%). Jumlah tersebut semakin meningkat sebesar 0.70% dibanding tahun 2016 sebanyak 34,019,095 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16,871,194 jiwa (49.59%), perempuan sebanyak 17.147.901 jiwa (50.41%) dan meningkat sebesar 1.43% dari tahun 2015 sebanyak 33,774,141 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16,750,898 jiwa (49.60%), perempuan sebanyak 17.023.243 jiwa (50.40%). Apabila dilihat dari persentasenya, persentase penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2017 laki-laki dan perempuan tahun 2015-2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
0-4	1 408 716	1 391 554	1 375 687	1 337 097	1 320 699	1 305 558	2 745 813	2 712 253	2 681 245
5-9	1 432 486	1 431 655	1 426 774	1 354 681	1 353 647	1 347 451	2 787 167	2 785 302	2 774 225
10-14	1 431 864	1 426 327	1 423 868	1 363 808	1 358 517	1 356 945	2 795 672	2 784 844	2 780 813
15-19	1 457 813	1 457 085	1 449 081	1 378 658	1 378 084	1 372 453	2 836 471	2 835 169	2 821 534
20-24	1 334 658	1 357 825	1 380 567	1 284 713	1 298 178	1 313 048	2 619 371	2 656 003	2 693 615
25-29	1 179 834	1 192 053	1 212 864	1 199 054	1 201 270	1 210 957	2 378 888	2 393 323	2 423 821
30-34	1 181 335	1 170 658	1 158 838	1 248 678	1 233 817	1 214 748	2 430 013	2 404 475	2 373 586
35-39	1 216 225	1 205 621	1 194 936	1 269 672	1 265 802	1 262 288	2 485 897	2 471 423	2 457 224
40-44	1 185 875	1 189 730	1 192 670	1 236 939	1 240 110	1 243 162	2 422 814	2 429 840	2 435 832
45-49	1 140 026	1 147 331	1 152 113	1 209 028	1 215 340	1 218 443	2 349 054	2 362 671	2 370 556
50-54	1 042 111	1 055 295	1 068 394	1 105 339	1 126 818	1 145 570	2 147 450	2 182 113	2 213 964
55-59	889 114	914 920	937 017	903 214	944 920	982 111	1 792 328	1 859 840	1 919 128
60-64	672 288	707 620	741 012	671 059	705 102	744 803	1 343 347	1 412 722	1 485 815
65+	1 178 553	1 223 520	1 274 272	1 461 303	1 505 597	1 552 235	2 639 856	2 729 117	2 826 507
Jumlah/ Persentase	16 750 898 49.60%	16 871 194 49.59%	16 988 093 49.59%	17 023 243 50.40%	17 147 901 50.41%	17 269 772 50.41%	33 774 141 100%	34 019 095 100%	34 257 865 100%

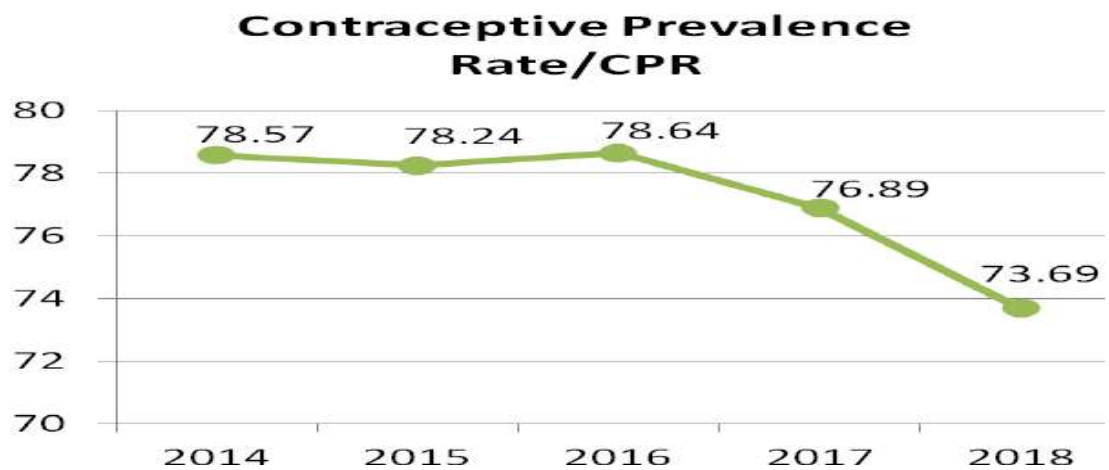
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2025

Sedangkan Total Fertility Rate (TFR)/Angka kelahiran Total Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SDKI 2017 sebesar 2.3 mengalami penurunan sebesar 0.2 dari SDKI 2012 sebesar 2.5. angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional yang berdasarkan SDKI 2017 sebesar 2.4 yang juga mengalami penurunan sebesar 0.2 dari SDKI 2012 sebesar 2.6. Namun demikian, angka sebesar 2.3 tersebut dirasakan masih tinggi yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak sehingga kedepan diharapkan dapat terkendali dan kembali menurun.



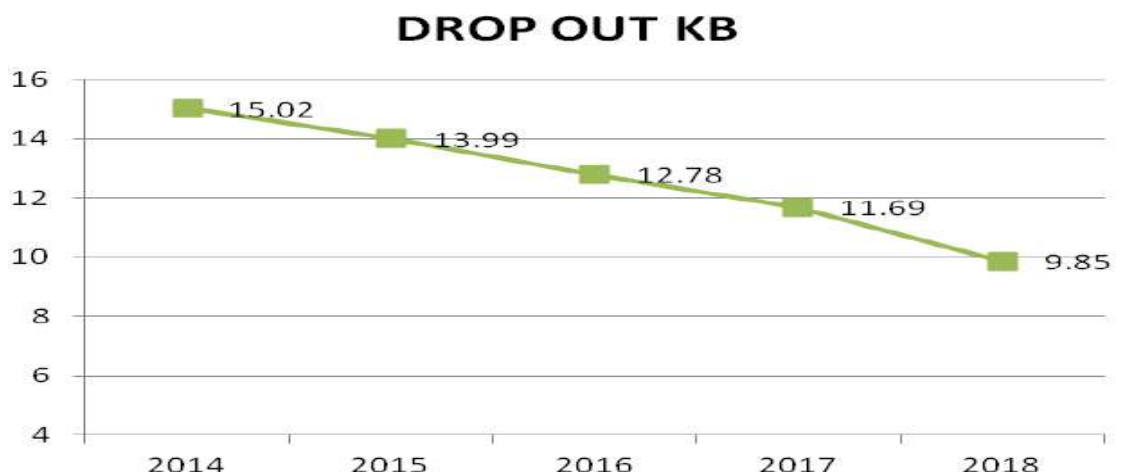
Gambar 2.13 Grafik Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017
Sumber : SDKI, 2017

Penurunan Total Fertility Rate (TFR)/Angka kelahiran Total dilakukan dengan menggalakkan program KB yang diarahkan pada capaian peningkatan jumlah peserta KB aktif. Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2014 bersifat fluktuatif, namun secara umum dapat dikatakan mengalami penurunan yaitu dari sebesar 78,57% menjadi 73,69% di tahun 2018. Namun demikian, penurunan kepesertaan KB dapat tertekan dengan semakin turunnya angka drop out KB dari sebesar 15,02% pada tahun 2014 menjadi 9,85% di tahun 2018. Sebaliknya, pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmet need) mulai tahun 2014 bersifat fluktuatif, terdapat kecenderungan bertambah yaitu dari sebesar 10,56% menjadi 13,06% di tahun 2018. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah kesertaan KB dan dapat memicu meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Penurunan kepesertaan KB aktif dan bertambahnya unmetneed KB disebabkan masih banyaknya peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 71,55%, terbatasnya jumlah PLKB (rata-rata 1 PLKB menangani 4-5 Desa) dan takut efek samping. Perkembangan Contraceptive Prevalence Rate/CPR dan unmetneed dapat dilihat sebagai berikut :



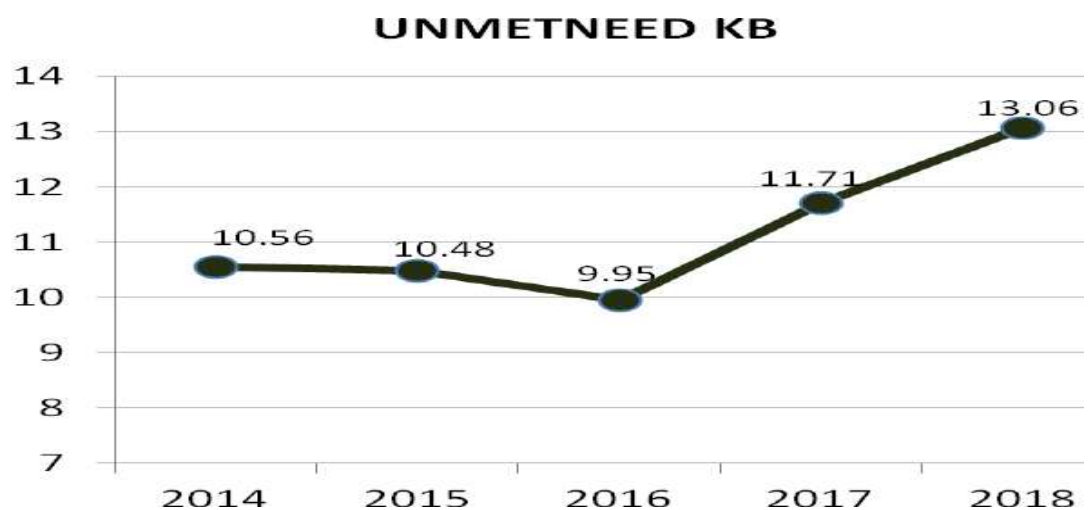
Gambar 2.14 Grafik Contraceptive Prevalence Rate/CPR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : BKKBN, 2019.



Gambar 2.15 Grafik Drop Out KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : BKKBN, 2019.



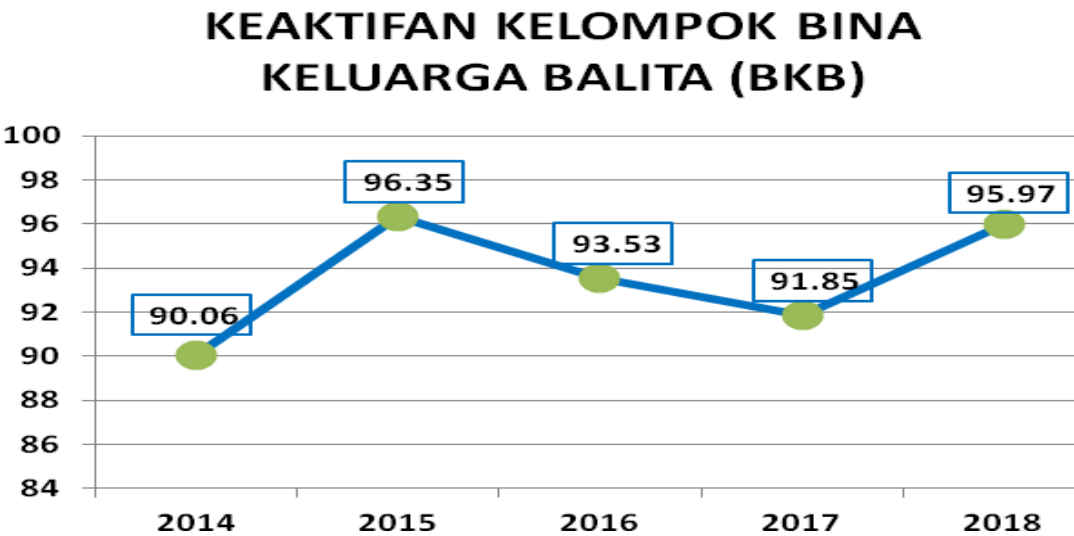
Gambar 2.16 Grafik Unmetneed KB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber : BKKBN, 2019.

5. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

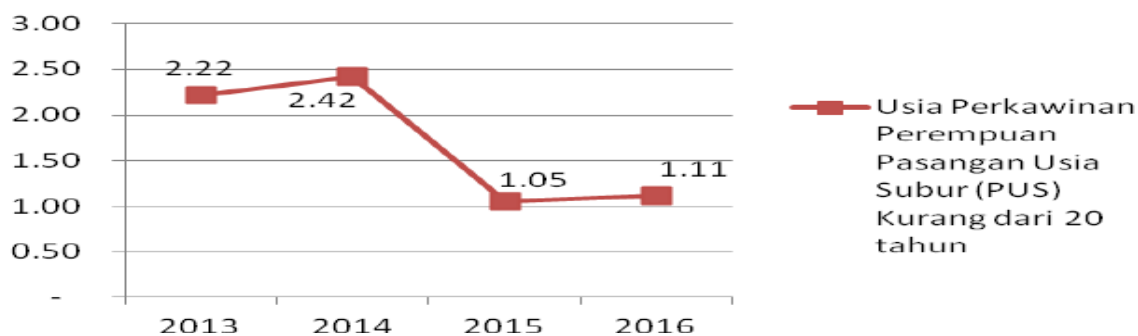
Ketahanan keluarga mencakup pengembangan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia). Perhatian yang besar diprioritaskan pada pengembangan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Meningkatnya kualitas Bina Keluarga Balita ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), tahun 2014 sebesar 90,06% menjadi 95,97% di tahun 2018. Hal tersebut perlu perhatian yang serius guna peningkatan keaktifan kelompok BKB melalui advokasi dan penggerakan disamping pembenahan data guna mendukung peningkatan kualitas tumbuh kembang anak dibawah lima tahun dan mencegah stunting di Jawa Tengah.

Sedangkan pengembangan Bina Keluarga Remaja lebih diprioritaskan pada pencapaian Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun. Pencapaian Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun bersifat fluktuatif, namun adanya kecenderungan menurun dari tahun 2013 sebesar 2,22 menjadi sebesar 1,11 di tahun 2016, sedangkan capaian tahun 2017 dan tahun 2018 belum tersedia datanya. Perkembangan keaktifan kelompok BKB dan Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.17 Grafik Keaktifan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
Sumber : BKKBN, 2018.

USIA PERKAWINAN PEREMPUAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) KURANG DARI 20 TAHUN



Gambar 2.18 Grafik Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2016
 Sumber : BKKBN, 2017.

Pemberdayaan ekonomi keluarga lebih diprioritaskan pada penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I. Jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun ke tahun semakin menurun, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II. Pada tahun 2015, persentase keluarga pra sejahtera sebesar 22,38%, menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 26,11%. Sementara persentase keluarga sejahtera I tahun 2015 sebesar 54,10%, semakin meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 20,70%. Selengkapnya kondisi keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2012	9.841.123	2.793.948	28,39	1.905.066	19,36	2.264.309	23,01
2013	10.024.478	2.724.692	27,10	2.003.596	19,99	2.273.481	22,68
2014	10.185.469	2.659.070	26,11	2.108.289	20,70	2.383.519	23,40
2015	9.719.925	2.175.667	22,38	5.258.349	54,10	2.285.909	23,52
2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Selanjutnya kinerja pelayanan perangkat daerah pada Renstra sebelumnya terinci pada table berikut :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Produk Kebijakan PUG	dokumen			3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	100	100	100	0	0
2	Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan	dokumen			1	1	1	1	1	2	2	0	2	1	200	200	0	200	100
3	Produk Kebijakan Terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur	dokumen			1	2	2	2	2	1	1	2	2	0	100	50	100	100	0
4	Produk Hukum Kebijakan daerah tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak serta responsif hak anak	dokumen			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	100	100	0	0
5	Prosentase Program, Kegiatan responsif gender SKPD Provinsi	%			40	48	58	63	68	41	47	51.6	63	68	102.50	97.92	88.97	100	100
6	Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Provinsi	%			16.3	19.2	23.2	26.1	28.3	1.29	20.34	32	32	32	7.91	105.94	137.93	122.60	113
7	Prosentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD (%)	%			62.85	65.99	69.28	72.74	76.37	65.71	65.99	100	100	100	104.55	100.00	144.34	137.47	131
8	Jumlah SKPD Provinsi dan Kab./Kota yang melaksanakan Anggaran Responsif Hak Anak	Kab/Kota			2	2	2	2	2	3	3	6	2	2	150.00	150.00	300.00	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
9	Ketersediaan data informasi gender dan anak di Kabupaten/Kota	Kab/Kota			10	15	20	30	35	10	15	20	30	35	100	100	100	100	100
10	% SKPD Provinsi yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan	%			15	20	25	35	40	15	20	25	35	40	100	100	100	100	100
11	% Kabupaten/ Kota yang mampu mengelola data dan informasi gender secara berkelanjutan	%			15	20	25	35	40	15	20	25	35	40	100	100	100	100	40
12	Prosentase Kelembagaan PUG, Dunia Usaha, Media Massa, PSW/G dalam PUG dan PUHA yang di bentuk di Kab/kota	%			8.57	8.57	5.71	0	0	51.43	60	68.57	0	0	600.12	700.12	1200.88	0	0
13	Indek Pembangunan Gender (IPG)	indeks			67.63	68.22	68.81	69.4	69.99	91.89	92.21	92.22	91.94	NA	135.87	135.17	134.02	132.47	NA
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks			69.99	70.49	70.99	71.49	71.99	74.46	74.8	74.89	75.10	NA	106.39	106.11	105.49	105	NA
15	Prosentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah	%			2.52	2.45	2.4	2.36	2.32	2.57	4.11	4.21	NA	NA	101.98	167.76	175.42		
16	Prosentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga parlemen	%			30	30	30	24	24	24	24	24	24	21	80.00	80.00	80.00	100	87.5
17	Prosentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta	%			92.73	93.88	93.88	95.34	95.82	97.43	95.89	95.79	NA	NA	105.07	102.14	102.03		

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
18	Rasio perempuan usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pendampingan kesehatan, pendidikan, ekonomi	%			0.14	0.16	0.18	0	0	0.14	0.16	0.18	0	0	100.00	100.00	100.00	0	0
19	Rasio kabupaten kota yang memenuhi Perlindungan Anak kesejahteraan dan hak-hak anak	%			57	11.4	17.1	22.8	28.6	57	11.4	62.86	60	82.85	100.00	100.00	367.60	263.15	289.68
					2.8	5.7	8.6	11.4	14.3	2.8	5.7	62.86	60	82.85	100.00	100.00	730.93	526.31	579.37
20	Ratio Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%			62.8	77.1	94.3	100	100	80	88.57	94.3	100	100	127.39	114.88	100.00	100	100
	Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Gender dan Anak pada :																		
21	Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindak lanjuti pengaduan	%			35.77	48.7	61.77	0	0	35.37	48.7	61.77	0	0	98.88	100.00	100.00	0	0
22	Cakupan ketersediaan petugas bantuan hukum terlatih untuk mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA	%			14.6	14.6	17.6	0	0	35	35	35	0	0	239.73	239.73	198.86	0	0
23	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%			100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100.00	100.00	100.00	0	0
24	Rasio KDRT pada perempuan dan Anak	%			0.028	0.026	0.022	0.019	0.017	0.008	0.0123	0.014	0.0157	0.0107	28.57	47.31	63.64	121.01	158.40

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
25	Jumlah Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan perlindungan perempuan kelompok rentan	Kabupaten			2	2	1	2	1	4	4	4	2	1	200.00	200.00	400.00	100	100
26	% anak korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, ABH yang mendapatkan penanganan responsif anak	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100	100
27	Jumlah Kelembagaan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan media yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA	lembaga PSW/G			5 0	5 2	5 5	5 7	5 8	5 0	5 2	5 5	5 7	5 8	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100 100	100 100
28	Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%			14.3	28.6	42.9	57.1	71.4	14.3	28.6	42.9	83.33	83.33	100.00	100.00	100.00	145.93	100
29	Contracepsi Prevalensi Rate (CPR)	%			77	78	79	79.5	80	78.57	78.24	78.64	76.89	74.69	102.04	100.31	99.54	96.71	92.11
30	Angka Dropout	%			14.75	14.5	14	13.75	13.5	14.75	13.99	12.78	11.69	9.85	100.00	96.48	91.29	117.6	137.06
31	Angka Unmet- need	%			10	9.75	9.5	9.25	9	10.56	10.48	9.95	11.71	13.06	105.60	107.49	104.74	78.99	68.90
32	Prosentase Ketersediaan KIE KB-KS di Kab/Kota	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100	100
33	Prosentase Kab/Kota yang diadvokasi pengembangan jejaring KB-KS	%			62.86	77.14	85.71	94.28	100	68.86	77.14	85.71	100	100	109.55	100.00	100.00	106.06	100
34	Prosentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	%			2.21	2.2	2.19	2.18	2.17	2.42	1.05	1.11	1.08	NA	119.00	110.00	47.95	201.85	NA
35	Prosentase pengembangan KIE tentang HIV/AIDS, NAPZA,PMS	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
36	Produk Hukum Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Draft Pergub/Pergub			0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	200.00	100	0	0	0
37	Persentase Kelompok BKB Aktif	%			0	0	0	96.45	96.5	0	0	0	91.85	95.97	0	0	0	95.23	99.45
38	Penurunan Keluarga Pra KS dan KS1	keluarga			4,665,592	4,618,936	4,602,746	4,556,718	4,511,150	4,767,359	7,434,016	NA	NA	NA	102.18	160.95	NA	NA	NA
39	Jumlah peserta KB Mandiri	orang			2,994,172	3,024,114	3,054,355	3,084,899	3,157,478	2,869,536	2,812,891	2,764,580	2,985,839	3,765,677	95.84	93.02	90.51	96.78	119.26
40	Prosentase anggota UPPKS ber KB	%			83.5	83.75	84	84.25	84.5	83.07	81.67	81.97	80.02	79.87	99.49	97.52	97.58	94.97	94.52
41	Prosentase kab/kota yang telah membentuk jaringan KB/KS	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Tingkat Kepuasan Pengguna layanan Administrasi Perkantoran	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
43	Umur pakai dan bertambahnya aset	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
		paket			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
44	Tingkat kedisiplinan pegawai	bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
45	Tingkat capaian kinerja SKPD	Fisik (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Keuangan (%)			98.7	98.75	98.8	98.85	98.9	98.48	98.04	98.75	98.61	97.50	99.78	99.28	99.95	99.75	98.58

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1,932,011,000	1,973,752,000	1,686,954,000	1,582,409,000	1,836,532,000	1,889,497,167	1,909,082,633	1,652,879,191	1,578,101,873	1,751,820,455	97.80	96.72	97.98	99.77	98.40
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	1,970,371,000	1,913,474,000	977,928,000	503,403,000	798,872,000	1,960,867,602	1,886,522,313	972,623,254	500,257,725	793,202,695	99.52	98.59	99.46	99.51	99.48
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64,926,000	28,026,000	36,900,000	-	9,050,000	64,644,000	27,945,000	36,374,400	-	9,050,000	99.57	99.71	98.58	-	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	107,732,000	102,552,000	38,010,000	14,000,000	35,150,000	101,580,250	96,957,500	167,208,000	7.500.000	32,975,000	94.29	94.54	439.91	53.57	94.56
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	153,355,000	-	-	-	-	153,354,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	916,000,000	802,000,000	523,765,000	150,000,000	75,000,000	891,714,800	773,600,500	516,079,960	139,288,000	75.000.000	97.35	96.46	98.53	92.86	100

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
7	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,203,669,000	1,165,106,000	856,847,000	876,325,000	1,210,862,000	1,128,059,900	1,148,725,000	835,060,450	858,148,400	1,188,237,800	93.72	98.59	97.46	98.83	98.06
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,963,500,000	2,252,398,000	1,789,762,000	2,887,025,000	8,453,248,000	1,865,140,228	2,161,605,750	1,762,724,300	2,762,102,492	8,187,760,398	94.99	95.97	98.49	96.61	99.03
9	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	232,400,000	859,307,000	774,975,000	1,118,615,000	946,796,000	224,200,000	858,054,800	773,585,500	1,092,592,600	942,722,000	96.47	99.85	99.82	96.35	98.83
10	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	450,000,000	450,000,000	304,497,000	-	-	450,000,000	450,000,000	304,497,000	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-
11	Program Pelayanan Keluarga Berencana	2,613,752,000	3,696,015,000	3,941,534,000	4,189,834,000	4,525,575,000	2,611,060,750	3,665,408,550	3,913,789,620	4,164,183,850	4,429,226,050	99.90	99.17	99.30	98.88	98.51
12	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	236,650,000	253,650,000	94,780,000	155,650,000	150,000,000	236,536,000	238,540,000	90,420,000	152,245,500	149,666,000	99.95	94.04	95.40	96.98	99.87
13	Program Pengembangan Model BKB-Posyandu-PAUD	135,250,000	218,970,000	167,385,000	294,693,000	322,000,000	134,749,500	216,644,500	160,050,000	282,059,300	321,976,800	99.63	98.94	95.62	94.17	99.99

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
14	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri	83,000,000	95,985,000	369,482,000	150,000,000	172,000,000	82,500,000	94,585,000	369,482,000	150,000,000	172,000,000	99.40	98.54	100.00	100	100
15	Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina Balita	531,000,000	708,935,000	1,134,443,000	775,000,000	801,895,000	531,000,000	707,491,300	1,113,167,000	729,228,700	799,767,033	100.00	99.80	98.12	96.61	99.60
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	215,700,000	133,315,000	-	-	-	211,494,500	133,059,400	-	-	0.00	98.05	99.81	-	-
	JUMLAH	12,593,616,000	14,735,870,000	12,830,577,000	12,696,981,000	19,336,980,000	12,324,904,197	14,446,657,346	12,801,000,075	12,415,708,440	18,853,404,231	97.86	98.03	97.78	97.78	97.50

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- h. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- j. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- k. Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;
- l. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
- g. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- h. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- j. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- k. Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- l. Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Jawa Tengah serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan;
- m. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- n. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- o. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- p. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- b. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak berKB;
- c. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
- d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- e. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- f. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proposional
- g. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- h. Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;
- c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- d. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :
 - 1) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
 - 3) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
 - 4) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
 - 5) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
 - 6) Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - 7) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
 - 8) Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;
 - 9) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak;
 - 10) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak utamanya data terpilah lintas sector.
- b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :
 - 1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
 - 3) Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana :
 - 1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
 - 2) Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
 - 3) Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota;

- 4) Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal;
- 5) Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.

d. Permasalahan terkait keluarga sejahtera :

- 1) Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan keluarga;
- 2) Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini;
- 3) Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
- 4) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

e. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
2. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan
2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota	Belum optimalnya kabupaten/kota memenuhi capaian indikator pemenuhan hak anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
3	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan
			dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4	Tingginya Angka kelahiran total dan jumlah keluarga pra sejahtera	Menurunnya angka kesertaan KB (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP
			Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota
			Belum adanya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal
			Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB
		Masih banyaknya keluarga yang ekonominya dibawah garis kemiskinan	Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga
5	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya kinerja perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah berdikari dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat dan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dengan Program Kerja antara lain :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” melalui kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

- Penyediaan *Basic Life Acces* (Klaster 1), melalui fasilitasi layanan KB MKJP bagi keluarga pra sejahtera guna peningkatan kesertaan KB;
- Penguatan *Sustainable Livelihood* (Klaster 2 dan 3)
 - Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan indeks pemberdayaan perempuan;
 - Penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya penurunan keluarga pra sejahtera.

Selain itu juga mendukung misi ke 4 (empat) yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” utamanya pada tujuan ke 1 yaitu “membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, sasaran ke 3 yaitu “meningkatkan akses dan kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dan kesetaraan gender” melalui pelebagaan PUG guna peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pelebagaan PUHA guna peningkatan pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak dan pengembangan provinsi layak anak, peningkatan partisipasi anak, peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak, peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak, peningkatan ketahanan keluarga yang didukung partisipasi masyarakat dan pengelolaan data yang baik, serta peningkatan peran serta kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).

Sedangkan Program Kerja Gubernur terpilih yang didukung antara lain :

- Program kerja ke 1 :
 - pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, melalui kegiatan pemberdayaan perempuan, sub kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan pemilu kepada perempuan guna peningkatan pemahaman peran perempuan dalam politik dan perlunya wakil perempuan dalam legislatif.
 - pelatihan gender, melalui kegiatan pelebagaan PUG dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender, fokus pada pelatihan penyusunan PPRG, penguatan tim driver provinsi dan kabupaten/kota dan pelatihan PUG bagi siswa SMA/SMK dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan tentang gender kepada lembaga pemerintah dan siswa SMA/SMK guna peningkatan indeks pembangunan gender di Jawa Tengah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
1	Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi ke 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi	Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi	• Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif • Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan • Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif • Mulai tumbuhnya kesadaran pemilih perempuan untuk menjaga suara/kebutuh

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
	sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Program Kerja ke 1 : Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; Program kerja ke 4 : Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni	Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat	Rendahnya pemahaman pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di provinsi dan kabupaten/kota Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota Rendahnya pemahaman	perempuan di bidang politik • Rendahnya kesempatan kerja/berwirausaha bagi perempuan • Belum adanya implementasi kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota • Rendahnya kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak • Rendahnya program kegiatan yang responsif hak anak di provinsi dan kabupaten/ kota • Belum adanya implementasi	an perempuan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan • Meningkatnya kesadaran perempuan untuk berwirausaha baik perorangan maupun berkelompok, dengan tetap menjaga dan mendampingi anak di rumah • Telah diundangkan Perda dan Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga • Adanya komitmen para pengambil kebijakan di kabupaten/kota dalam pemenuhan hak anak • Adanya kewenangan provinsi dalam UU No. 23 Tahun 2014 untuk pelebagaan PUHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha • Telah diundangkan

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
			pembangunan keluarga dalam mewujudkan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan hak anak tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota • Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu provinsi dan kabupaten/kota • Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia layanan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya sistem perlindungan anak (termasuk sistem hukum, kebijakan serta pelaksanaannya) • Kurangnya pemahaman bagi keluarga dalam pemenuhan hak anak • Belum optimalnya partisipasi masyarakat	Perda dan Pergub tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga • Adanya komitmen Kepala Daerah dan kerjasama dengan pemprov lainnya dan instansi lain dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
			dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak Belum tersedianya data informasi gender dan anak sesuai ketentuan yang berlaku Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak	• Pengumpulan data lintas sektor belum tersinkronisasi • Kurangnya advokasi pergerakan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas hidup anak	• Sistem aplikasi gender dan anak telah mulai disinkronisasikan dengan data adminduk • Adanya komitmen dan dukungan lembaga masyarakat/ ormas perempuan dan anak dalam pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga
			Belum optimalnya implementasi program KKBPK	• Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota • Belum adanya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal • Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga	• Telah disusunnya kebijakan bonus demografi daerah • Dukungan Kepala Daerah dalam pemberian pengetahuan kepada siswa SMA/SMK • Telah disusunnya dokumen pemetaan perkiraan

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
			berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) dan tingginya unmetneed Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera	berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana - Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP dan tingginya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda, tidak ber KB karena kurangnya pemahaman dan takut efek samping - Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 4 desa/kelurahan) - Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana - Belum optimalnya partisipasi	pengendalian penduduk dan analisa dampak kependudukan mulai tiap tahun mulai tahun 2017 dan 2018 - Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan - Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat - Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan - Komitmen dan dukungan Kepala Daerah

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
			Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program pembangunan keluarga	keluarga pada kelompok BKB, BKL, BKR dalam mendukung ketahanan keluarga • Belum optimalnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/kota • Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini • Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga • Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program pembangunan keluarga	dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan • Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

3.3

Telaahan Renstra K/L

3.3.1.

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2015 – 2019

Dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
1	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; dengan sasaran :	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan			
	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga	• IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender		• IDG dan komposisinya bersifat fluktuatif		
		berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	namun cenderung meningkat tiap tahun	program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; dengan sasaran :	Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang			
	a. Berkurangnya kasus	kualitas hidup dan perlindungan	• Tingginya kasus kekerasan	• Terbatasnya personil yang	• Adanya kerjasama

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
	kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dankeluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat	terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Buruh migran, IRT ODHA menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		• Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	Tujuan : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dengan sasaran :				
	a. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mampu memenuhi hak anak		• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatkan				

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat dan	Pendorong
	partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dengan sasaran :				
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019

Dalam RPJMN tahun 2015-2019, dalam mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Tujuan : mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas; dengan sasaran :	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan			
1	Menurunnya Angka kelahiran Total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang			
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan	Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP karena takut efek samping	Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan
3	Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	yang ditugaskan kepada Daerah	Bertambahnya persentase unmetneed	Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/ kota (rata-rata 1 : 4 desa/ kelurahan)	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP	Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program	Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
5	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out KB)	edukasi, data dan partisipasi masyarakat	Tingginya drop out KB	keluarga berencana - Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/ kota - Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

Tabel 3.5
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW		NIHIL	NIHIL
	Program indikatif		NIHIL	NIHIL
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	NIHIL	NIHIL
	Skenario dan Rekomendasi		NIHIL	NIHIL
No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas		

		pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat		
--	--	---	--	--

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Peningkatan kesetaraan gender;
 - b. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
 - c. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang;
- 2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - b. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
 Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
 Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
 - b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
 Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaa n Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20	75.20
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	88.57	91.43	100	100
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000
		a. Meningkat nya peran perempua n dan hak anak dalam pembangu nan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	34.24	34.27	34.30	34.30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	31.43	34.29	34.29
		b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	8.09 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000
2	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.22	2.20	2.18	2.18
		a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	75.50	76.00	76.00
		b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	NA	21.64	21.14	20.64	20.14	19.64	19.64
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.05	78.48	78.50	78,85	79,00	79,05	79,10	79,10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi

Strategi yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan;
- 2) Meningkatkan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi;
- 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender;
- 4) Meningkatkan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- 5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
- 6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan;
- 7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
- 8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 10) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
- 11) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Meningkatkan kesertaan KB MKJP;
- 13) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
- 14) Meningkatkan pepaduan kebijakan pengendalian penduduk;
- 15) Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK;
- 16) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan;
- 17) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB;
- 18) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja;
- 19) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
- 20) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga;
- 21) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
- 22) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

2. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
3. Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB;
4. Peningkatan keluarga sejahtera;
5. Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	1) Meningkatkan kapasitas bagi perempuan melalui pemberdayaan 2) Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi 3) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender 4) Meningkatkan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha 5) Meningkatkan kualitas keluarga yang responsif hak anak 6) Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan 7) Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga 8) Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
		b. Menurunnya kasus kekerasan	1) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan kualitas perlindungan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		terhadap perempuan dan anak	dan anak 2) Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko 3) Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perempuan dan anak
2	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas	a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	1) Meningkatkan kesertaan KB MKJP 2) Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 3) Meningkatkan pepaduan kebijakan pengendalian penduduk 4) Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK 5) Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan 6) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB	Pengendalian penduduk dan peningkatan kesertaan KB
		b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja; 2) Meningkatkan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;	Peningkatan keluarga sejahtera

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3) Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1) Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas layanan publik perangkat daerah
		b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra, sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Tahun 2019 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai, maka pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2019 ditujukan untuk **“Meningkatkan daya saing perempuan dan anak serta kesertaan KB dan keluarga sejahtera menuju kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik, serta pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha guna penancangan Provinsi menuju layak anak;
- Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat serta peningkatan SDM dan sarana prasarana layanan penanganan korban;
- Penyediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota serta peningkatan kesertaan KB aktif MKJP dan penggerakan KB bersama mitra kerja dan masyarakat;
- Peningkatan keaktifan tribina di daerah stunting tinggi dan pemberdayaan UPPKS di daerah miskin;

- e. Pemantapan tata kelola administrasi perangkat daerah dan layanan informasi publik yang tertib.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 merupakan kelanjutan dari fokus tahun sebelumnya untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target Renstra, maka pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 ditujukan untuk **“Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan serta kesertaan KB dan pemberdayaan keluarga menuju kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik serta pengembangan kabupaten/kota layak anak didukung kelembagaan PUG dan PUHA yang semakin meningkat;
- b. Pengembangan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan serta peningkatan layanan penanganan korban sesuai standar di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Peningkatan dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota serta peningkatan penggunaan KB MKJP dan penggerakan KB bersama mitra kerja dan masyarakat;
- d. Peningkatan peran aktif kelompok Tribina dan pengembangan UPPKS guna mendukung pengentasan keluarga pra sejahtera;
- e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 ditujukan untuk **“Meningkatkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga didukung peran perempuan dan anak dalam pembangunan serta kesertaan KB dan ekonomi keluarga yang semakin mantap”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan akses dan peran perempuan serta peningkatan keterlibatan anak dalam pembangunan;
- b. Percepatan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdimensi kewilayahan melalui peningkatan peran dan kualitas kelembagaan serta dukungan peran aktif masyarakat;
- c. Peningkatan dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota dan peningkatan kesertaan KB melalui dukungan fasilitasi layanan KB MKJP, penggerakan masyarakat dan pengembangan KIE;
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan UPPKS didukung ketahanan keluarga yang semakin mantap;
- e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat

daerah yang semakin baik dan akuntabel.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022 ditujukan untuk **“Meningkatkan kesetaraan gender dan hak anak serta mengendalikan angka kelahiran guna mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak serta keluarga kecil berkualitas”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
- b. Percepatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu melalui pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara bersama oleh seluruh tingkatan pemerintahan dan penanganan korban yang berkualitas sesuai standar;
- c. Dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota dan peningkatan kesertaan KB melalui penggerakan dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB bersama mitra kerja dan lembaga masyarakat;
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan UPPKS didukung ketahanan keluarga yang semakin mantap;
- e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021 ditujukan untuk **“Mewujudkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga yang setara dan berkualitas”**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di berbagai sektor pembangunan;
- b. Penguatan percepatan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu melalui pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara bersama oleh seluruh tingkatan pemerintahan dan penanganan korban yang berkualitas sesuai standar;
- c. Dukungan ketersediaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di kabupaten/kota dan peningkatan kesertaan KB melalui penggerakan dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB serta peran serta mitra kerja dan lembaga masyarakat;
- d. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung peran aktif Tribina dan UPPKS yang semakin meningkat;
- e. Peningkatan tata kelola administrasi dan pelayanan publik perangkat daerah yang semakin baik dan akuntabel.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

1. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
2. Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender;
3. Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak;
4. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak;
5. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga;
6. Kegiatan Penyusunan data dan informasi PPPA.

B. Program Perlindungan Perempuan Dan Anak

1. Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak;
3. Kegiatan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan;
4. Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH);
5. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan;
6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak.

C. Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

1. Kegiatan Peningkatan kesertaan KB MKJP;
2. Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;
3. Kegiatan Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan;
4. Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk;
5. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan dan KB;
6. Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB.

D. Program Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga
2. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga;
3. Advokasi Kesejahteraan Keluarga.

E. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah;
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor;
12. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah;
13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas;
15. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
16. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah;
17. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

F. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75.10	NA	75.12		75.14		75.16		75.18		75.20		75.20			
				Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	60	82.86	82.86		85.71		88.57		91.43		100		100			
				Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100,000	8.51	8.4	8.37		8.29		8.22		8.15		8.07		8.07			
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	34.13	0	34.18		34.21		34.24		34.27		34.30		34.30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	20	22.86	22.86		25.71		28.57		31.43		34.29		34.29			
		20215	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak						9.394.570		10,094,000		10,844,000		11,594,000		12,344,000		48,335,649	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
				Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	%	0	0	25		30		30		30		30		30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama tingkat madya dan tingkat nindya	%	57.14	80	80		82.86		85.71		88.57		91.43		91.43			
				Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	50	50	83.33		83.33		100		100		100		100			
		20215001	Pemberdayaan Perempuan						5,562,400		4,137,000,000		4,384,000,000		4,559,000,000		4,717,000,000		16186250		Kabupaten Cilacap Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sragen
				Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	Orang	0	0	30	472,740	80	2,137,000	80	2,184,000	80	2,259,000	80	2,317,642	350	9,370,382		
				Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik	Orang	5,260	18,100	20,700	5,089,660.00	5,700	2,000,000	5,700	2,000,000	5,700	2,000,000	5,700	2,000,000	66,860	10,259,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20215002	Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender						774,540		1,582,000		1,675,000		1,800,000		1,887,000		7,881,349		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	OPD	73	73	73	728,040	73	1,432,000	73	1,500,000	73	1,600,000	73	1,700,000	73	7,122,849		
				Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	%	100	100	100	46,500	100	150,000	100	175,000	100	200,000	100	225,000	100	796,500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20215003	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak						863,025		1,450,000		1,575,000		1,750,000		1,925,000		7,713,700		;Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	Kabupaten/Kota	20	28	28	776,525	29	1,300,000	30	1,400,000	31	1,550,000	32	1,700,000	32	6,877,200		
				Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani	%	100	100	100	86,500	100	150,000	100	175,000	100	200,000	100	225,000	100	836,500		
		20215004	Peningkatan Partisipasi Anak						305,250		420,000		450,000		470,000		556,358		2,201,608		Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan	Lokasi	30	0	34	305,250	34	420,000	35	450,000	35	470,000	36	556,358	36	2,201,608		
		20215005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dan Keluarga						1,265,905		1,505,000		1,660,000		1,815,000		1,970,000		8,215,905		Provinsi Jawa Tengah kota semarang sragen sukoharjo banyumas
				Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Kelompok	5	0	5	1,170,210	5	1,250,000	5	1,350,000	5	1,450,000	5	1,550,000	5	6,770,210		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	Kelompok	0	0	20	24,500	20	125,000	20	150,000	20	175,000	20	200,000	20	674,500		
				Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	Kelompok	0	0	30	71,195	30	130,000	30	160,000	30	190,000	30	200,000	30	771,199		
		20215006	Penyusunan data dan informasi PPA						784,000		1,000,000		1,100,000		1,200,000		1,250,000		5,334,000		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah laporan data dan informasi PPA	Dokumen	3	0	5	784,000	5	1,000,000	6	1,100,000	6	1,200,000	6	1,250,000	6	5,334,000		
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100,000	7.24	8.20	8.16		8.13		8.09		8.05		8.02		8.02			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penang ggun g Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20216	Perlindungan Perempuan Dan Anak						3,103,355		7,581,300		7,883,430		8,194,773		8,485,750		35,572,853	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Bidang Peman uhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100,000	5.37	5.93	5.87		5.81		5.76		5.70		5.64		5.64			
				Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100,000	13.92	12.76	12.76		12.66		12.56		12.46		12.36		12.36			
		20216001	Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan						1,571,000		2,462,180		2,600,000		2,700,000		2,800,000		12,133,180		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	Kasus	865	1,017	1,007	1,571,000	997	2,462,180	987	2,600,000	977	2,700,000	967	2,800,000	967	12,133,180		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20216002	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak						529,655		750,000		899,000		1,033,000		1,191,000		4,402,655		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	1,100	1,208	1,198	529,655	1,188	750,000	1,178	899,000	1,168	1,033,000	1,158	1,191,000	1,158	4,402,655		
		20216003	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan						208,125		250,000		275,000		300,000		325,000		1,358,125		Provinsi Jawa Tengah
				Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100	100	100	208,125	100	250,000	100	275,000	100	300,000	100	325,000	100	1,358,125		
		20216004	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan						370,000		400,000		450,000		500,000	550,000	2,270,000		3527820		Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			n																		
				Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/p elayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	0	0	8	370,000	8	400,000	8	450,000	8	500,000	550,000	2,270,000	8	3527820		
		20216005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak						70,300		140,000		160,000		175,000		200,000		745,300		Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayan an terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembanga nnya	Kelomp ok	0	0	15	70,300	15	140,000	15	160,000	15	175,000	15	200,000	15	745,300		
		20216006	Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)						354,275.00		400,000		410,000		420,000		430,000		2,014,275		Jawa Tengah
				Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	100	100	100	354,275.00	100	400,000	100	410,000	100	420,000	100	430,000	100	2,014,275		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Mewujudkan keluarga kecil berkualitas				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2.30	NA	2.26		2.24		2.22		2.20		2.18		2.18			
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	76.89	73.69	75.00		75.10		75.25		75.50		76.00		76.00			
		20815	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana						6,149,619		6,929,619.00		7,689,619.00		8,674,619.00		9,674,619.00		39,166,465.00	Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat; Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera; Bidang Keluarga Berencana Advokasi dan KIE	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%	0	0	8.33		16.67		25		33.33		41.67		41.67			
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	28.45	27.43	28		28.50		29		29.50		30		30			
				Unmetneed KB	%	11.71	13.06	12.75		12.25		11.75		11.25		10.75		10.75			
				Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%	0	0	100		100		100		100		100		100			
		20815001	Peningkatan kesertaan KB MKJP						3,527,506		4,029,619		4,549,619		5,244,619		5,774,619		23,125,982		35 Kab/Kota
				Jumlah Peserta KB MKJP	Orang	1.446.069	1.319.403	1.346.822	3,527,506	1.370.872	4,029,619	1.394.922	4,549,619	1.418.973	5,244,619	1.443.023	5,774,619	1.443.023	23,125,982		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20815002	Pemadua n Kebijakan Dan Penginteg rasian Pendidika n Kependud ukan						637,880		700,000		775,000		850,000		1,000,000		3,962,880		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun	Dokum en	3	3	3	154,498	3	500,000	3	550,000	3	600,000	3	700,000	3	2,504,498		
				Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk	Lokasi	35	35	35	483,382	35	200,000	35	225,000	35	250,000	35	300,000	35	1,458,382		
		20815003	Pemetaan Pengendal ian Penduduk						189,625		250,000		275,000		300,000		325,000		1,339,625		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah dokumen informasi kependuduka n dan KB tingkat provinsi	Dokum en	2	2	2	189,625	2	250,000	2	275,000	2	300,000	2	325,000	10	1,339,625		
		20815004	Penyediaa n profil kependud ukan dan KB						27,750		50,000		60,000		80,000		100,000		317,750		Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan	Dokumen	1	0	1	27,750	1	50,000	1	60,000	1	80,000	1	100,000	5	317,750		
		20815005	Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB						1,678,428.00		1,750,000		1,850,000		2,000,000		2,250,000		9,528,428.00		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tidak berKB	Orang	774,075	852,677	832,303	1,678,428.00	799,664	1,750,000	767,025	1,850,000	734,385	2,000,000	701,746	2,250,000	701,746	9,528,428.00		
		20815006	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB						88,430		150,000		180,000		200,000		225,000		891,800		Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB	Kelompok	11	0	20	88,430	20	150,000	20	180,000	20	200,000	20	225,000	20	891,800		
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22.14	22.14	21.64		21.14		20.64		20.14		19.64		19.64			
		20816	Keluarga Sejahtera						1,139,215		1,738,880		1,912,769		2,104,045		2,314,459		9,209,368	Bidang Peningkatan Penduduk dan Keluarga Sejahtera; Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	
				Persentase kelompok tribina yang aktif	%	91.75	96.06	96.10		96.15		96.20		96.25		96.30		96.30			
				Persentase UPPKS yang aktif	%	87.68	87.73	89.75		89.90		90		90.10		90.20		90.20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	%	0	0	20		40		60		80		100		100			
		20816002	Advokasi Ketahanan Keluarga						761,507		870,000		945,000		1,100,000		1,189,459		4,865,966		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah kelompok Tribina yang aktif	Kelompok	27,077	26,713	26,723	761,507	26,737	870,000	26,751	945,000	26,765	1,100,000	26,779	1,189,459	26,779	4,865,966		
		20816003	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga						104,140		150,000		180,000		200,000		225,000		859,140		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok	2	0	2	136,800	2	150,000	2	180,000	2	200,000	2	225,000	10	891,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20816004	Advokasi Kesejahteraan Keluarga						273,568		718,880		787,769		804,045		900,000		3,484,262		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif	Kelompok	18,199	15,033	15,379	273,568	15,404	718,880	15,422	787,769	15,439	804,045	15,456	900,000	15,456	3,484,262		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Angka	0	0	70		74		77		80		85		85			
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Angka	71.05	78.48	78.50		78.55		79		79.05		79.10		79.10			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Kepuasan masyarakat	Angka	0	0	70		74		77		80		85		85			
		20201	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						4,620,869		6,291,997		7,470,745		7,254,320		8,000,252		26,383,863	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
																				n Pendu duk Dan Keluar ga Berenc ana	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	90		90		90		90		90		90			
		20201001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						314,500		379,500		417,450		459,195		505,115		1,616,565		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Dokumen	4	4	4	314,500	4	379,500	4	417,450	4	459,195	4	505,115	4	1,616,565		
		20201002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						11,100		30,000		35,000		45,000		50,000		126,100		Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	11,100	12	30,000	12	35,000	12	45,000	12	50,000	12	126,100		
		20201003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah						639,490		809,047		900,000.00		950,000		1100000		3,448,537		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	639,490	12	809,047	12	900,000	12	950,000	12	1100000	12	3,448,537		
		20201004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						82,325		150,000		160,000		170,000		180,000		572,325		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	82,325	12	150,000	12	160,000	12	170,000	12	180,000	12	572,325		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20201005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						811,250		1,000,000		1,250,000		1,300,000		1,400,000		4,461,250		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	811,250	12	1,000,000	12	1,250,000	12	1,300,000	12	1,400,000	12	4,461,250		
		20201006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						481,000		605,000		665,500		732,050		805,255		2,556,755		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	481,000	12	605,000	12	665,500	12	732,050	12	805,255	12	2,556,755		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20201007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						92,500		150,000		160,000		170,000		180,000		582,500		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	92,500	12	150,000	12	160,000	12	170,000	12	180,000	12	582,500		
		20201008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						12,025		35,000		45,000		55,000		65		92,090		Jawa Tengah
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12,025	12	35,000	12	45,000	12	55,000	12	65000	12	#VALUE!		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20201009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah						713,637		1,100,000		1,200,000		1,300,000		1,400,000		4,413,637		Jawa Tengah
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	713,637	12	1,100,000	12	1,200,000	12	1,300,000	12	1,400,000	12	4,413,637		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20201010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						241,702		400,000		450,000		550,000		600,000		1,691,702		Jawa Tengah
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	241,702	12	400,000	12	450,000	12	550,000	12	600,000	12	1,691,702		
		20201011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						466,662		593,450		652,795		718,075		789,882		2,502,789		Jawa Tengah
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	0	0	10	466,662	10	593,450	10	652,795	10	718,075	10	789,882	50	2,502,789		
		20201013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Op						-		480,000		850,000						1,330,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			erasional																		
				Jumlah Kendaraan Dinas terpenuhi	Unit	0	0	0	-	3	480,000	1	850,000	0		0		0	1,330,000		
		20201014	Kegiatan Pengadaaan Pakaian Dinas						27,750		50,000		60,000		70,000		80,000		287,750		Jawa Tengah
				Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Unit	0	0	100	27,750	100	50,000	100	60,000	100	70,000	100	80,000	500	287,750		
		20201015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						18,500		60000		75000		85000		95000		333,500		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	0	20	18,500	20	60000	20	75000	20	85000	20	95000	100	333,500		
		20201016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						74,000		250,000		300,000		350,000		400,000.00		1,374,000		1) Provinsi Jawa Tengah; 2) Kab rembang; 3) kab Brebes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
						(2017/2018)		2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Dokumen	0	0	3	74,000	3	250,000	3	300,000	3	350,000	3	400,000.00	15	1,374,000		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	78.48	78.5		78.52		78.54		78.56		78.58		78.58			
		20202	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						531,875		950,000		1,050,000		1,200,000		1,300,000		5,031,875	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	0	0	100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		20202001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						351,500		500,000		550,000		650,000		700,000.00		2751500		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	2	2	351,500	1	500,000	1	550,000	1	650,000	1	700,000.00	6	2751500		
		20202002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						180,375.00		450,000		500,000		550,000		600,000		2,280,375		Provinsi Jawa Tengah
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	1	180,375.00	1	450,000	1	500,000	1	550,000	1	600,000	5	2,280,375		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20	75.20
2	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	88.57	91.43	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	34.24	34.27	34.30	34.30
5	Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	31.43	34.29	34.29
6	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	8.09 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000
7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.22	2.20	2.18	2.18
8	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	75.50	76.00	76.00
9	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	NA	21.64	21.14	20.64	20.14	19.64	19.64
10	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.05	78.48	78.50	78,85	79,00	79,05	79,10	79,10

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	0	0	25	30	30	30	30	30
2	Persentase kabupaten/kota menuju layak anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya	57.14	80.00	80.00	82.86	85.71	88.57	91.43	91.43
3	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	50	50	83.33	83.33	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	5.37 Per 100.00 0	5.93 Per 100.000	5.87 Per 100.00 0	5.81 Per 100.00 0	5.76 Per 100.00 0	5.70 Per 100.00 0	5.64 Per 100.00 0	5.64 Per 100.000
5	Rasio korban kekerasan terhadap anak	13.92 Per 100.00 0	12.76 Per 100.000	12.76 Per 100.00 0	12.66 Per 100.00 0	12.56 Per 100.00 0	12.46 Per 100.00 0	12.36 Per 100.00 0	12.36 Per 100.000
6	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	28.45	27.43	28.00	28.50	29.00	29.50	30.00	30.00
7	Unmetneed KB	11.71	13.06	12.75	12.25	11.75	11.25	10.75	10.75
8	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian penduduk	0	0	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	41.67
9	Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah yang aktif	53.33	53.33	100	100	100	100	100	100
10	Persentase kelompok tribina yang aktif	91.75	96.06	96.10	96.15	96.20	96.25	96.30	96.30
11	Persentase UPPKS yang aktif	87.68	87.73	89.75	89.90	90.00	90.10	90.20	90.20
12	% ormas/mitra kerja dalam program pembangunan keluarga tingkat daerah yang aktif	0	0	20	40	60	80	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
- 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan kelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;
5. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;
6. Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKS secara efektif dan berkelanjutan.